

<b>VISI RPJMD 2017-2022</b>	
Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi	
<b>MISI 2 RPJMD</b>	
Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas	
<b>TUJUAN RPJMD</b>	
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	
<b>INDIKATOR TUJUAN RPJMD</b>	
Indeks Ketersediaan Infrastruktur	
<b>SASARAN RPJMD</b>	
Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	
<b>INDIKATOR SASARAN RPJMD</b>	
Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	
<b>TUJUAN RENSTRA</b>	
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum	
<b>INDIKATOR TUJUAN RENSTRA</b>	
Rasio Ketersediaan Infrastruktur	
<b>TARGET</b>	
2018	-
2019	-
2020	-
2021	67,43%
2022	100,00%
<b>SASARAN RENSTRA</b>	
Meningkatkan Layanan Pembangunan Infrastruktur	
<b>INDIKATOR SASARAN RENSTRA</b>	
Indeks Layanan Pembangunan Infrastruktur	
<b>TARGET</b>	
2018	-
2019	-
2020	-
2021	0,684
2022	0,805

PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM	PROGRAM		
PROGRAM PEMBANGUNAN SDA	PROGRAM PEMBANGUNAN SDA	PROGRAM PEMBANGUNAN SDA	PROGRAM PENYELenggaraAN JALAN	PROGRAM PENYELenggaraAN PENATAAN RUANG	URUSAN/PROGRAM PERTANAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPT)		
SASARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM		
Meningkatkan jaringan irigasi dalam kondisi baik	Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Meningkatkan kapasitas infrastruktur pengendalian daya rusak air	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur bina marga	Meningkatkan kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang	Meningkatkan luas lahan termanfaatkan untuk kepentingan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang	Meningkatkan ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	Meningkatkan Fungsi Alat berat		
INDIKATOR SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		
Rasio Irigasi	Persentase Penyediaan Air Baku	persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang	persentase luas lahan termanfaatkan untuk kepentingan infrastruktur	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	Persentase Jumlah Alat Berat dalam kondisi baik		
TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
2018	0,17	2018	-	2018	-	2018	-	2018	87,50%
2019	0,22	2019	-	2019	-	2019	-	2019	87,50%
2020	0,28	2020	0,0%	2020	91,00%	2020	35%	2020	92,17%
2021	0,50	2021	1,0%	2021	91,50%	2021	75%	2021	96,09%
2022	1,00	2022	1,0%	2022	92,00%	2022	100%	2022	95,00%
KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN		
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRRIGASI YANG LUASNYA 1000-3000 HA DAN DAERAH IRRIGASI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENYELenggaraAN JALAN PROVINSI	PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA RINCI TATA RUANG PROVINSI	PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI	PENYELenggaraAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI	ADMINISTRASI UMUM		
				KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH PROVINSI	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 DAERAH PROVINSI	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI			
					PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				
					PENETAPAN SUBYEK DAN OBYEK REDISTRIBUSI TANAH LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 DAERAH PROVINSI				
					PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 PROVINSI				